

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PELAKSANAAN  
KEGIATAN 1.20.1.20.05.17.31  
TAHUN ANGGARAN 2017**

1. Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Program/Kegiatan :
  - Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Daerah
  - Kegiatan Bimbingan teknis Pemanfaatan Barang Daerah
3. Nama KPA/PPTK :
  - Nama KPA : KIKI PEKIK PRAJA ALAM,SSTP,MSi
  - Nama PPTK : FATHIN HAMAMAH,SH,MM
4. Rujukan
  - a. KAK Perencanaan
  - b. RPJMD :

Misi RPJMD Nomor 3 Tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional
  - c. Renstra SKPD :

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Latar Belakang
  - a. Dasar Hukum Tugas Fungsi
    - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
    - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bojonegoro;
    - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojoengoro Tahun 2013 s/d 2018
    - Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro
    - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
    - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;
    - Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD
  - b. Gambaran Umum Penerima Manfaat

Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, oleh karena hal tersebut maka pengendalian yang baik akan mempermudah dalam penyajian data apabila diperlukan dalam rangka pertanggungjawaban SKPD maupun apabila ada pengawasan dari Auditor Internal maupun eksternal, serta Pemeriksa lainnya.

c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

- Register Penerimaan SPM
- Register SP2D
- Lampiran Berkas Pengajian SPM
- Arsip SP2D

6. Keluaran Kegiatan

- Output : - Terkendalinya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD  
- Pengarsipan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD
- Outcome : - Tertib administrasi pengelolaan keuangan di SKPD  
- Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

7. Strategi Pencapaian Keluaran :

a. Metode pelaksanaan/program kerja/konsep pelaksanaan (tenaga ahli, alokasi SDM sesuai tingkat keahlian) :

- Mencatat seluruh ajuan SPM dari SKPD : 1 orang
- Meneliti kelengkapan berkas SPM : 2 orang
- Menguji SP2D : 4 orang
- Memproses ajuan SPM menjadi SP2D : 2 orang
- Mengarsipkan SP2D beserta lampirannya : 2 orang

b. Jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan

- Jadwal detail pelaksanaan Kegiatan Bimbingan teknis Pemanfaatan Barang Daerah  
Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD

NO	URAIAN KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				x								
2	Uang Lembur				x								
3	Honor Moderator,				x								
4	Belanja cetak			x									
5	Belanja Penggandaan			x									
6													

- Jadwal Penyerapan anggaran

Triwulan I                      Rp  
 Triwulan II                    Rp 5.000.000  
 Triwulan III                  Rp 119.675.101  
 Triwulan IV                   Rp

8. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian Bimbingan Teknis dilaksanakan satu tahun

9. Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Umum

- Spesifikasi Teknis
  - Pembuatan Materi
  - Konsultasi terkait Nara sumber luar Daerah
  - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- Spesifikasi Umum
  - Terkendalinya dan terkelolanya SPJ SKPD sesuai ketentuan yang berlaku

10. Biaya yang diperlukan

Rp. 124.675.101

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN
1	Honor Panitia Pelaksana	6.300.000,00
2	Uang lembur	6.825.000,00
3	Honor Moderator	2.500.000,00
4	Penggandaan materi	51.650.101,00
5	Belanja Cetak materi	11.800.000,00
6	Belanja Jasa tenaga Ahli	45.600.000,00

11. Penerima Manfaat

- Penerima manfaat dari Kegiatan Bimbingan Teknis untuk Pertanggungjawaban (SPJ) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Auditor Internal maupun eksternal.

12. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan evaluasi Pelaporan dilaksanakan setiap bulan

**Menyetujui**  
**Kuasa Pengguna Anggaran**  
**Kepala Bidang Aset Daerah**

**PPTK,**  
**Kasubid Penggunaan dan**  
**Pemanfaatan**

**KIKI PEKIK PRAJA ALAM,SSTP,MSi**  
**NIP. 19791212 199810 1 002**

**FATHIN HAMAMAH,SH,MM**  
**NIP. 19720919 199803 2 010**

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**M. IBNU SOEYOETI, SE. M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19641117 199301 1 003**